

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia menghadapi berbagai tantangan pembangunan di sejumlah sektor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun telah ada berbagai upaya, pencapaian kesejahteraan masyarakat belum maksimal karena masih terdapat berbagai masalah yang belum teratasi, termasuk dalam sektor pertanian. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan sektor pertanian melalui berbagai kebijakan, terutama yang berkaitan dengan masalah pangan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional (Nindi *et. al.*, 2024).

Mengembangkan sektor pertanian dan wilayah pedesaan secara maksimal merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Sektor ini memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, secara konvensional sektor pertanian kerap dipandang memiliki peran pasif dalam pembangunan ekonomi dan hanya berfungsi sebagai pelengkap. Sejarah di negara-negara barat menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi kerap dikaitkan dengan perubahan struktural yang cepat dari ekonomi agraris menuju sektor industri modern dan jasa yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, tugas pokok sektor pertanian hanya dipandang sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan pangan murah untuk mendukung perkembangan sektor industri, yang dianggap

menjadi sektor andalan dalam perencanaan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. (Fikrman, *et, al.*, 2017).

Menurut Gushardi (2017), salah satu permasalahan utama dalam sektor pertanian adalah rendahnya pendapatan buruh tani, hal ini menyebabkan keterbatasan mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masalah ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa buruh tani tidak memiliki lahan sendiri dan hanya bekerja di atas tanah milik orang lain. Ketidakmampuan mereka untuk memiliki lahan tersebut sebagian besar diakibatkan oleh keterbatasan modal. Akibatnya, buruh tani hanya bergantung pada upah rendah yang diperoleh dari pekerjaan mereka di lahan milik orang lain.

Ketahanan pangan beras lokal sangat bergantung pada keberlangsungan produksi pertanian. Buruh tani yang sejahtera cenderung lebih produktif dan berkomitmen untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Dengan upah yang layak, buruh tani dapat berinvestasi dalam praktik pertanian yang lebih baik, seperti penggunaan pupuk organik dan teknik pertanian berkelanjutan. Tindakan ini tidak hanya memperbesar produksi panen, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), ketahanan pangan dapat ditingkatkan melalui dukungan terhadap petani lokal dan buruh tani, termasuk dalam hal upah yang adil (Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO, 2018).

Kesejahteraan buruh tani yang meningkatkan berkontribusi pada ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produksi pangan lokal. Ketika buruh tani mendapatkan upah yang lebih baik, mereka lebih mampu membeli bahan pangan, berinvestasi dalam pertanian, dan meningkatkan produktivitas. Hal ini menciptakan

siklus positif yang mendukung ketahanan pangan. Penelitian oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan petani dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan gizi masyarakat (Bank Dunia, 2019).

Upah yang adil dan layak sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup buruh tani. Dengan upah yang memadai, buruh tani dapat mencukupi keperluan hidup mereka, seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan upah buruh tani dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses mereka terhadap layanan dasar. Misalnya, studi Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan bahwa upah yang lebih tinggi berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi buruh tani (Organisasi Perburuhan Internasional (ILO, 2020).

Permasalahan yang dihadapi oleh buruh tani di Indonesia tergolong cukup kompleks. Pertama, mereka menempati posisi sosial yang sangat rendah dalam struktur masyarakat. Kedua, berkaitan dengan upah, buruh tani termasuk dalam kelompok yang menerima bayaran paling rendah, yakni hanya sekitar sepuluh hingga dua puluh ribu rupiah per hari (Burhanuddin *et al.*, 2022).

Kondisi tersebut menepatkan para buruh tani dalam situasi yang sangat merugikan. Hal ini juga terlihat pada buruh tani padi di Desa Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim yang mengalami hal serupa. Dalam masa panen atau bertanam para buruh di desa ini berangkat ke lahan pada pukul 6 pagi dan pulang di siang hari biasanya setelah waktu dzuhur. Upah yang mereka dapat yaitu berkisar 40 ribu rupiah.

Kabupaten Muara Enim mempunyai luas wilayah sebesar 7.483,06 km² yang terdiri dari 22 Kecamatan dan mempunyai 256 Desa/Kelurahan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, 2024). Pada tahun 2017, luas lahan sawah irigasi di Kabupaten Muara Enim sebesar 6.360 ha, luas lahan sawah tadah hujan sebesar 4.267 ha, serta luas lahan sawah lebak polder sebesar 12.780,47 ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, 2018). Produksi padi pada 2024 diperkirakan mencapai 2.842,56 ribu ton gabah kering giling, meningkat sebesar 9,79 ribu ton atau 0,35 persen dibandingkan dengan produksi padi tahun 2023 yang tercatat sebanyak 2.832,77 ribu ton gabah kering giling (Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, 2024).

Tabel 1. Luas Lahan Sawah Dirinci Menurut Penggunaannya di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 (Ha)

No.	Kecamatan	Irigasi / Irrigation	Tadah Hujan / Cistem	Lebak Polder / Lowland	Jumlah / Total
1.	Semende darat laut	1.120	0	0	1.120
2.	Semende darat ulu	1.828	0	0	1.828
3.	Semende darat Tengah	1.219	0	0	1.219
4.	Tanjung agung	2.186	250	0	2.436
5.	Rambang	0	0	0	0
6.	Lubai	0	90	164	254
7.	Lawing kidul	0	19	0	19
8.	Muara enim	0	1.707	0	1.707
9.	Ujan mas	0	1.506	0	1.506
10.	Gunung megang	7	587	87	681
11.	Benakat	0	108	43	151
12.	Rambang dangku	0	0	637	636,5
13.	Gelumbang	0	0	306	306
14.	Lembak	0	0	138	138
15.	Sungai rotan	0	0	4.740	4.740
16.	Muara Belinda	0	0	5.979	5.979
17.	Kelekar	0	0	315	315
18.	Belimbing	0	0	370	370
19.	Lubai ulu	0	0	2	2
20.	Belide darat	0	0	0	0
Jumlah		6.320	4.267	12.780.47	23.407.15

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Muara Enim, 2018.

Desa Pandan Enim, yang berada di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, tidak hanya bertindak sebagai sentra produksi pangan di tingkat desa, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga serta meningkatkan ketahanan pangan pada level lokal, peran ini menjadikannya Desa Pandan Enim sebagai komponen vital dalam mendukung ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang peneliti ingin meneliti tentang “Peran upah buruh tani padi dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran upah buruh tani dalam meningkatkan perekonomian keluarga?
2. Berapa besar kontribusi pendapatan buruh tani terhadap pendapatan keluarga?

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran upah buruh tani dalam meningkatkan perekonomian keluarga.
2. Menghitung kontribusi pendapatan buruh tani terhadap pendapatan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan penelitian.
2. Bagi Perguruan Tinggi dan masyarakat umum, hasil penelitian ini berfungsi untuk menambah bahan literatur serta pengetahuan mengenai peran upah buruh tani padi dalam meningkatkan perekonomian keluarga.
3. Bagi masyarakat, sebagai landasan dan bahan informasi untuk penelitian yang sejenis, serta dapat pula sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian serupa dalam lingkup yang lebih luas.